

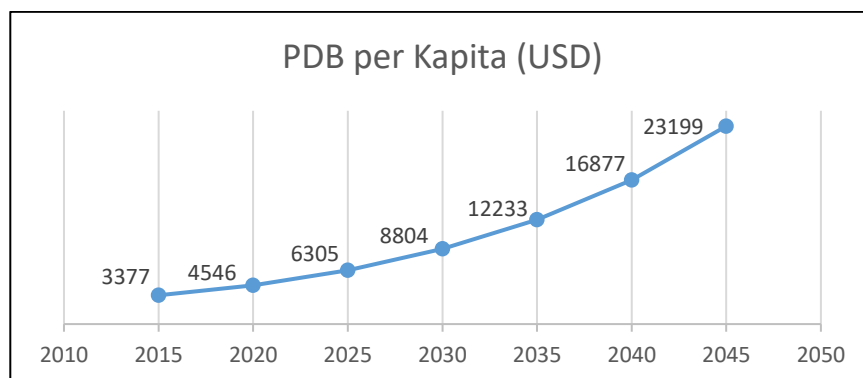
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia berada di peringkat keempat dalam hal jumlah penduduk di dunia, setelah India, Cina, dan Amerika Serikat, menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Indonesia tidak hanya memiliki jumlah penduduk yang besar, tetapi juga wilayah yang luas, menjadikannya negara dengan potensi ekonomi yang signifikan. Hal ini bukan hanya spekulasi penulis semata, namun pada tahun 2022, Indonesia dinyatakan sebagai salah satu dari 20 negara dengan Produk Domestik Bruto tertinggi di dunia oleh International Monetary Fund (IMF). Indonesia berada di urutan ke-17 dalam hal Produk Domestik Bruto (PDB) dengan nilai US\$1,29 triliun (IMF, 2023).

Selain itu dalam perjalanan waktu menuju satu abad Indonesia merdeka di tahun 2045, pemerintah Indonesia telah menyiapkan target dan rancangan kebijakan untuk menuju Indonesia Emas di Tahun 2045. Negara Indonesia diprediksi akan memasuki masa keemasan di tahun 2045 karena pada rentang tahun 2030-2040 Indonesia mengalami bonus demografi yang bisa dimanfaatkan dengan baik akan mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1.1 Target PDB perkapita Indonesia (Sumber: Kementerian PPN/Bappenas)

Sebagaimana tertuang dalam paparan Visi Pembangunan nasional tahun 2045 Indonesia memiliki salah satu target besar dibidang ekonomi yakni ekonomi maju dan berkelanjutan. Selain itu Indonesia juga menargetkan untuk mencapai nilai PDB per kapita sebesar 23.199 USD atau setara dengan 362 juta rupiah (Bappenas, 2019). Garis waktu untuk mencapai target tersebut terlihat pada gambar 1.1. Sedangkan skenario pertumbuhan ekonomi untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2.

Skenario Pertumbuhan Ekonomi			
1986 - 2015		SKENARIO 2016-2045**	
		Dasar	Tinggi
5.1	Pertumbuhan Ekonomi	5.1	5.7
16	Peringkat PDB Dunia*	7	5
3,378	PDB per kapita* dalam USD	9,794	23,199
	Tahun menjadi Negara Pendapatan Tertinggi	2038	2036
32.8	Peranan Investasi*	33.1	38.1
6.4	Pertumbuhan Ekonomi	5.4	6.4
21.1	Peranan Industri*	22.5	26
6.3	Pertumbuhan	5.2	6.3
13.5	Peranan Pertanian	7.8	7.4
3.1	Pertumbuhan	3	3.2

Gambar 1.2 Skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia (Sumber: Kementerian PPN/Bappenas)

Pada tahun 2018 hingga tahun 2023 PDB per kapita Indonesia terus meningkat dari angka 56 juta rupiah hingga mencapai 75 juta rupiah dengan rata-rata peningkatan sebesar 3,8% pertahunnya dan dipengaruhi juga oleh adanya wabah pandemi di tahun 2019-2020 sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia

melambat. Untuk mencapai tujuan ekonomi Indonesia pada tahun 2045, pemerintah melakukan berbagai cara melalui beberapa kebijakan dan strategi diantaranya adalah mendorong perekonomian nasional melalui belanja pemerintah dan investasi asing.

Dalam ilmu ekonomi makro, Produk Domestik Bruto (PDB) dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengeluaran pemerintah, permintaan rumah tangga untuk barang dan jasa, permintaan bisnis untuk investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, serta pengeluaran sektor luar negeri untuk ekspor dan impor.

Kebijakan pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang menjadi bukti intervensi pemerintah dalam perekonomian. Fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemerintah dapat dicapai melalui kebijakan fiskal, dengan salah satu fokus utamanya adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran atau belanja pemerintah. Pemerintah, melalui kebijakannya, dapat melakukan pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pengadaan barang/jasa pemerintah memainkan peran penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mayoritas alokasi anggaran pemerintah dalam APBN dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa, belanja modal, seperti pembelian barang, sebagian belanja bantuan sosial, dan juga belanja hibah. Belanja pemerintah untuk pengadaan barang/jasa yang telah dianggarkan ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, tidak termasuk investasi. Sementara itu, belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk membentuk modal/investasi dalam bentuk tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jaringan, dan fisik lainnya. Belanja modal ditujukan untuk mendukung

pembiayaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Terkait dengan hal ini, peran aktif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP), atau yang biasa dikenal sebagai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa, sangat penting dalam berkolaborasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah untuk mempercepat proses pengadaan anggaran, terutama untuk pembangunan infrastruktur, agar dapat segera menstimulasi perekonomian Indonesia (DPR RI, 2023).

Menurut Laporan Perekonomian Indonesia untuk tahun 2022, pengeluaran pemerintah telah mengalami peningkatan. Realisasi pendapatan pemerintah daerah di Indonesia hingga Maret 2022 mencapai Rp407,23 miliar, yang setara dengan 13,98% dari target pendapatan APBD tahun 2022. Realisasi pendapatan secara kumulatif dari Januari hingga Maret 2022 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp442,06 miliar. Dari sisi belanja, realisasi penggunaan APBD sampai dengan Maret 2022 mencapai Rp174,51 miliar atau setara dengan 5,77% dari total alokasi anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk tahun 2022. Penggunaan anggaran belanja Pemerintah Indonesia dari Januari hingga Maret 2022 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun 2021, yaitu sebesar Rp131,80 miliar (BI, 2022).

Beberapa studi empiris telah mengungkapkan adanya hubungan antara kebijakan belanja barang/jasa dengan dinamika perekonomian nasional maupun regional. Seperti studi yang dilakukan oleh Gosal dkk. (2022) di kota Manado dari

tahun 2005 hingga 2021. Studi ini menemukan bahwa kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah terbukti secara empiris memberikan dampak atau pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional. Lebih lanjut, dalam kerangka hubungan kausalitas, pertumbuhan ekonomi juga dapat memberikan dampak terhadap besarnya pengeluaran pemerintah. Pengaruh ini diidentifikasi secara parsial dan simultan. Secara parsial belanja modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja barang/jasa memiliki pengaruh negatif signifikan. Meskipun secara parsial menunjukkan arah pengaruh yang berbeda, namun secara bersama-sama (simultan) baik belanja modal maupun belanja barang/jasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado.

Dewi & Suputra (2017) mengungkapkan fenomena yang berbeda dibandingkan dengan penelitian sejenis. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bali. Sementara itu, dana alokasi umum dan belanja modal tidak terbukti memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dalam penelitian yang sama, Santosa (2013) menemukan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah memiliki dampak yang kecil terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi di Indonesia. Dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Secara spesifik, penelitian ini mengungkapkan fakta empiris bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil hanya berdampak pada penurunan

jumlah kemiskinan daerah. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya berdampak kecil terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang di atas, mengenai banyaknya hasil studi yang berbeda-beda mengenai kebijakan desentralisasi fiskal ini menunjukkan masih adanya *research gap*. Sesuai dengan tujuan diberlakukan desentralisasi fiskal, seharusnya kebijakan tersebut lebih dirasakan langsung oleh daerah. Hal ini menarik penulis untuk mencoba menganalisis kembali penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan indikator-indikator yang sesuai, yang dapat mempertajam penjelasan mengenai apakah pendapatan dan belanja pemerintah yang diterapkan akan benar benar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi dari luar negeri (*foreign direct investment*); transaksi berjalan (*current account*); jumlah penduduk; produktivitas; lingkungan yang adil; ekonomi yang efisien; infrastruktur yang tersedia; dan tingkat teknologi, baik secara teoritis maupun empirik juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa pertanyaan yang ingin diteliti pada penelitian ini adalah :

1. Apakah pendapatan asli daerah dan belanja pemerintah memiliki pengaruh, baik langsung ataupun tidak langsung terhadap kondisi ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja pemerintah terhadap kondisi ekonomi di Indonesia dengan belanja barang/jasa pemerintah sebagai variabel interveningnya?

3. Apakah variabel makro ekonomi memiliki pengaruh, baik langsung ataupun tidak langsung, terhadap kondisi ekonomi di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh variabel makro ekonomi terhadap kondisi ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel interveningnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja pemerintah baik langsung ataupun tidak langsung terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Setelah diketahui hubungannya, penelitian ini juga melihat apakah besaran belanja barang/jasa daerah memiliki peran sebagai variabel intervening dalam hubungan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makro ekonomi baik langsung ataupun tidak langsung terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Seperti halnya besaran belanja barang/jasa pemerintah, peneliti juga meneliti bagaimana Indeks Pembangunan Manusia memiliki peran sebagai variabel intervening pada hubungan antara variabel makro ekonomi dengan kondisi ekonomi daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki manfaat untuk banyak pihak, seperti pemerintah, dunia pendidikan, dan juga untuk Masyarakat luas. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memfokuskan faktor apa saja yang perlu ditingkatkan untuk mencapai perkembangan ekonomi daerah yang ideal melalui kebijakan fiskalnya. Untuk dunia Pendidikan, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah menggunakan variabel intervening lainnya. Sedangkan bagi masyarakat

luas, penelitian ini mengedukasi bahwa untuk mencapai kondisi ekonomi yang ideal di suatu wilayah, bukan hanya peran pemerintah yang turut andil, namun peran masyarakat juga sangat diperlukan.